

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D. (2021, Februari 21). *Bisnis.com*. Diambil kembali dari *Bisnis.com*:
<https://lifestyle.bisnis.com/read/20210221/104/1358899/brand-fesyen-besar-berguguran-besutan-umkm-justru-mudah-bangkit>
- Badan Pusat Statistik. (2019).
- Bank Indonesia. (2021, November 24). *Bank Indonesia*. Diambil kembali dari
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2331221.aspx
- berkaos.com. (2016, September 27). *berkaos.com*. Diambil kembali dari PT Berkaos Sandang Nusantara : <https://berkaos.com/sejarah-serta-perkembangan-perusahaan-clothing-dan-distro-di-indonesia/>
- Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah. (2021, Desember 2). *UMKM Kabupaten Boyolali*. Diambil kembali dari Portal Satu Data KUMKM: <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota/Kabupaten%20Boyolali>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta.

Kementerian Keuangan. (2021). *APBN KITA*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2020). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta: Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Langford, B., & Ohlenburg, T. (2015). *Tax Revenue Potential and Effort. International Growth Centre Working Paper*.

Mahatmavidya, P. A. (2021, November 15). *PT Mid Solusi Nusantara*. Dipetik April 23, 2022, dari Mekari: <https://mekari.com/blog/proses-bisnis/>

- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Nindita, H. (2021, Januari 21). *Tirto.id*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/bagaimana-industri-fashion-bertahan-selama-tahun-pandemi-2020-f9rt>
- Nurlinda, & Sinuraya, J. (2020, Desember). Potensi Pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 126-141.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Prabowo, D. S. (2018). STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN USHA HOME INDUSTRI DI F.A.P CLOTJING KABUPATEN MALANG. *Jurnal Valtech*, 123-130. Diambil kembali dari <https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/view/749>
- Purwanto. (2014). *Modul Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pusdiklat Pajak.
- Rahmana, A. (2009). Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009*, B12-B15.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta: Indonesia.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP Volume 4 Nomor 2*, 137-146.
- Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 548-553.
doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1537>
- Waluyo. (2007). *Mengenal Self Assessment System Menurut Para Ahli*. Diambil kembali dari Mbizmarket: <https://www.mbizmarket.co.id/news/mengenal-self-assessment-system-menurut-para-ahli/>
- Wicaksono, B. (2018). Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.